

## **Fenomena Kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia**

**Oleh : Yayan Rudianto**

### ***Abstract***

*Reformation of Republic Indonesia Authority as unitary state that has been held since 1998 places the government not in a good position in the eye of its people. The gap between the great expectation on the reformation and the reality of having a happier life that have not felt by the people, creates frustration, that one of the forms is expressed by social violence act.*

*According to KontraS, along 2011, social violence happened in Indonesia, based on intensity and escalation: there are more or less 10 cases happened between April and July 2011 and September - December 2011. These violence generally relates to the conflict of natural resource management, local politic succession, until social friction of society daily life. The pattern of the violence involves society community, police, and business corporation community in the location of the event. Besides Lampung, Bima, and Papua, the violence spot also happens in Bali and Ambon. In order not to threaten national integrity, the State or Government needs to formulate substantial alternative solution soon rather than ceremonial formalistic.*

*Based on eleven offered solutions, both explicitly and implicitly, places the government as the party that decides the success of social violence handling. Our constitution has guaranteed human rights by confessing every Indonesian society rights to get protection from government as stated on Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

***Keywords : Conflict, Violence, and Pluralistic Structure of Indonesian Society.***

---

### **I. Pendahuluan**

Reformasi penyelenggaraan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berlangsung cukup lama jika dihitung sejak tahun 1998. Selama kurang lebih 14 tahun, reformasi ini meliputi aspek-aspek pokok penyelenggaraan kekuasaan negara yang selama orde baru mengalami kemadegan atau bahkan kemunduran jika ukurannya adalah pemerintahan demokrasi.

Perubahan pada suprastruktur penyelenggaraan kekuasaan negara sudah tepat seperti revisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan secara terencana, tidak spontan. Hingga tahun 2012 masyarakat Indonesia dibuat tercengan-cengan atas perubahan cepat yang dilakukan oleh rezim reformasi dibandingkan dengan rezim orde baru. Misalnya, perundang-undangan yang mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan

pemerintah daerah atau yang lebih dikenal dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah berubah cepat dalam kurun waktu 1998-2012. Telah terjadi dua kali revisi yakni dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi secara terbatas menyangkut aturan pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu rezim orde baru hanya memedomani satu undang-undang yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Tentu saja perubahan dramatis ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara melalui fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara yang ada. Dalam lingkungan internal, misalnya mengenai ketatalaksanaan aparatur negara/pemerintah, mereka terlihat cukup kerepotan dalam menyesuaikan sistem kerja dengan tuntutan budaya kerja yang baru yang berbeda jauh daripada era orde baru.

Era reformasi menuntut organisasi publik memiliki macam budaya yang integratif yakni perhatian terhadap hubungan antar manusia dan perhatian terhadap kinerja dua-duanya tinggi (*integrative culture*), dan segera meninggalkan macam budaya *Caring (caring culture)* yakni rendahnya perhatian terhadap kinerja dan tingginya perhatian terhadap hubungan antar manusia. Penghargaan atas perpaduan dan harmoni bukan kinerja pelaksanaan tugas.

Analisis terhadap keempat macam budaya organisasi yakni *apathetic culture*, *caring culture*, *excating culture*, dan *integrative culture*, bila dikaitkan dengan organisasi-organisasi publik di Indonesia, kesimpulannya adalah *caring culture*. Hal ini tampak dari ciri-ciri birokrat sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat.
2. Lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat.
3. Meminimalkan risiko dengan cara menghindari inisiatif (prakarsa).
4. Menghindari tanggung jawab.
5. Menolak tantangan.
6. Tidak suka berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Konsekuensi dari budaya kinerja seperti ini adalah situasi kerja lebih diwarnai perilaku orang-orang di dalam organisasi yang bercirikan: *like-dislike*, bapakisme, asal bapak senang (ABS), sogok-menyogok, korupsi, kolusi, nepotisme, daripada pengerahan kemampuan terbaik dari orang-orang tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Seharusnya situasi kerja semacam ini cepat-cepat ditanggalkan dan ditinggalkan ketika memasuki era reformasi yang lebih menekankan pada kemampuan, prestasi kerja, atau *merit system*.

Kalau dicermati lebih dalam, sebab utama adalah gerakan awal reformasi oleh kaum reformis tahun 1998 belum cukup jelas menghasilkan panduan reformasi berdasarkan keterlibatan sebagian besar rakyat sejak awal pergerakan hingga lengsernya Presiden Soeharto, apalagi dengan sengaja para elit pergerakan melibatkan mereka dalam proses perumusannya. Ada kesan asalkan pemerintahan orde baru berakhir dirasa sudah lebih dari cukup. Dalam lingkungan eksternal muncul beragam ketidakpuasan masyarakat karena reformasi yang sangat dicita-citakan mampu merubah nasib bangsa ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera, ternyata tidak kunjung terwujud. Beragam kenyataan yang berbeda dengan yang dicita-citakan akhirnya menimbulkan frustrasi di tengah-tengah masyarakat.

Bentuk ekspresi yang dapat dilihat mulai dari menyalahkan kaum reformis karena sebab gerakan merekalah kestabilan pemerintahan orde baru terganggu, menimbulkan ketidakpatian masa depan, kegaduhan politik yang tak kunjung reda sehingga berimbas pada kesulitan memenuhi hajat hidup yang paling dasar sekalipun: sandang, pangan, dan papan, hingga menghujam jauh lebih ke dalam struktur sosial yakni pola hubungan sosial yang tadinya relatif ajeg menjadi terganggu dengan adanya konflik sosial yang mengeras yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial.

Konflik dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah fenomena yang sangat alamiah. Persoalannya terletak pada masalah apakah menimbulkan aksi kekerasan atau tidak. Kekerasan bisa dilihat sebagai manifestasi dari suatu konflik yang tidak terlembaga (*un-institutionalized conflict*), sebaliknya adalah konflik yang terlembaga dengan baik (*institutionalized conflict*), akan dapat diselesaikan melalui cara-cara yang damai. Setidaknya terdapat dua tipe kekerasan yaitu yang bersifat personal dan yang bersifat kolektif atau sosial. Kekerasan personal berakar pada konflik personal, sementara kekerasan sosial umumnya berakar pada konflik sosial. Kekerasan sosial memiliki implikasi ekonomi, dan sosial-politik yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kekerasan personal.

Kekerasan sosial sangat erat kaitannya dengan konflik sosial; kedua terminologi ini mengacu pada hal yang sama. Tetapi menunjukkan sedikit perbedaan bahwa kekerasan sosial lebih merujuk pada bentuk fisik atau wujud nyata dari aksi yang dilakukan sekelompok orang atau massa pada suatu waktu dan tempat tertentu, seperti perusakan, pembunuhan, penjarahan, penyerangan, pembakaran, tawuran, penyanderaan, dan aksi-aksi kekerasan lainnya.

Sementara itu konflik sosial lebih mengacu pada permasalahan yang lebih mendasar dari munculnya suatu aksi kekerasan sosial, seperti ditulis Ocorandi (1998) ketika menganalisa kerusuhan akibat kelangkaan bahan pokok di awal tahun 1998 sebagai berikut: "*Riots are a symptom of a deeper problem*". Dalam hal ini *riots* (kerusuhan) adalah aksi kekerasan sosial,

sementara *deeper problem* (permasalahan yang lebih dalam) itu adalah konflik sosial, yaitu perbedaan ras yang diiringi ketimpangan sosial ekonomi antara penduduk pribumi dan etnis Cina. Sehingga dapat dikatakan bahwa acapkali kekerasan sosial merupakan manifestasi dari konflik sosial, dan seringkali diadopsi sebagai cara berkonflik, walau tidak semua konflik sosial bermuara pada suatu kekerasan sosial.

Konflik sosial sebagai realitas sosial, bukan hal yang mengada-ngada atau tabu untuk dibicarakan. Realitas sosial, sebetulnya tidak mudah ditangkap dan dimengerti dengan mata telanjang. Di antara alasannya ialah makna atas realitas sosial sangat tergantung pada konteksnya. Konteks bagaimana sang aktor (pelaku) memaknai tindakan yang dipilihnya. Dari sinilah para peneliti masalah-masalah sosial, perlu juga menelusuri lewat perspektif *emic* (*insider looking*) yang berarti pula memahami kebudayaan masyarakat yang dipelajari. Tanpa itu, informasi atau data yang dikumpulkan seringkali bercorak artifisial (permukaan) atau meminjam istilah Erving Goffman, menangkap dari sudut panggung depan (*front stage*), belum kepada panggung belakang (*back stage*). Padahal, makna sebenarnya ada di dalam panggung belakang itu sendiri.

Namun, apapun alasannya, suatu upaya untuk memahami satu atau berbagai persoalan dengan melalui atau lewat suatu penelitian, sudah bisa diartikan sebagai upaya memahami secara lebih bersungguh-sungguh. Syaratnya, temuan yang didapat tidak harus diklaim sebagai “harga mati” atau sebagai “kebenaran final”.

Realitas sosial yang terjadi atas kekerasan sosial ini banyak diungkap para pihak yang *concern* terhadap masalah-masalah sosial dan integrasi nasional. Salah satu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Lembaga ini prihatin dengan menguatnya serangkaian kekerasan massal di tengah masyarakat di berbagai tempat akhir-akhir ini. Tajamnya tensi kekerasan sosial, baik yang terjadi di Lampung, Bima, Papua, dan beberapa wilayah lainnya, menunjukkan adanya upaya perlawanan dan sekaligus ekspresi kefrustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia. Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat, akan berdampak luas pada meningkatnya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia.

Fenomena kekerasan ini sesungguhnya amat kontraproduktif dengan banyak pernyataan politik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY dan Istana kerap melontarkan wacana-wacana untuk menuntaskan beragam persoalan bangsa dengan pendekatan bermartabat. Namun ruang pembuktiannya masih teramat minimalis.

KontraS meyakini kekerasan massal yang terjadi di Lampung, Bima, dan Papua tidak terjadi secara tiba-tiba (*spontaneous violence*). Ada akumulasi kekecewaan akibat ketidakcocokan (Inkompatibilitas) antara harapan masyarakat Indonesia terhadap janji-janji pemerintah. Inkompatibilitas menimbulkan friksi sosial yang terjadi tidak hanya di perkotaan, namun nyaris di banyak belahan Republik ini.

Lampung, Bima, dan Papua bisa menjadi contoh dari gagalnya negara dalam mengelola dinamika kepentingan di daerah. Isu politik lokal melalui Pilkada di Papua, isu pengelolaan sumber daya alam di Bima, hingga kekacauan dalam pengelolaan distribusi politik lokal sebagaimana yang terjadi di Lampung; menjadi ajang unjuk kekuatan dan kekuasaan kepentingan-kepentingan elite. Konflik dan kekerasan massal ini menjadi fakta dan sekaligus problem sosial-politik yang harus dihadapi masyarakat dari hari ke hari.

Konflik sosial yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial cenderung lebih sering terjadi pada bangsa dengan struktur masyarakat yang majemuk, pluralis, multietnis seperti Indonesia. Struktur seperti ini merupakan potensi untuk membentuk disintegrasi sistem dan integrasi sistem. Secara konseptual, struktur masyarakat yang bersifat majemuk dapat dilihat dari:

1. Majemuk horisontal.

Yaitu struktur masyarakat memiliki ciri-ciri tertentu dalam berbagai kelompok, ciri-ciri tersebut antara masyarakat kelompok yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, memiliki kedudukan yang sama. Ciri-ciri masyarakat majemuk horisontal yang paling menonjol adalah didasarkan pada suku bangsa, bahasa, sosial budaya, dan agama. Terdapat 366 suku bangsa; posisi suku bangsa mempunyai kedudukan dan posisi yang sama.

2. Struktur vertikal.

Adalah konsep tentang struktur masyarakat yang berdasarkan ciri-ciri tertentu menyebabkan terjadinya struktur sosial berlapis. Dalam pelapisan tersebut, terjadinya bentuk struktur masyarakat piramida atau yang di sebut *prismatik society*, dalam prismatic ini terdapat adanya kelompok masyarakat lapisan atas yang populer di sebut dengan elit, kelompok masyarakat lapisan menengah, dan kelompok masyarakat lapisan bawah yang jumlahnya cenderung lebih besar di banding kelompok lapisan atasnya. Elit dalam *prismatic society* secara formal atau non formal memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kelompok masyarakat di lapisan bawahnya.

Dalam tinjauan aspek politik ekonomi, struktur vertikal seringkali dijelaskan dengan pendekatan teori konflik yaitu adanya struktur kelas dalam *prismatic society* dalam konsep pembagian dua kelas yaitu kelas penguasa (kelompok semu) dan kelas yang dikuasai (kelompok

kepentingan). Kelompok semu cenderung mempertahankan kekuasaannya (*status quo*), sedangkan kelompok kepentingan, selalu berupaya untuk mengartikulasikan kepentingannya menjadi kelompok semu.

Tinjauan aspek politik ini seringkali terkait pada aspek ekonomi. Kelompok semu yang memiliki akses permodalan, teknologi, dan aspek ekonomi lainnya cenderung mendominasi struktur masyarakat dalam suatu sistem bahkan dapat terjadi kelompok masyarakat tertentu yang terpinggirkan atau termarginalisasi dalam struktur masyarakat suatu sistem.

Tinjauan aspek sosial budaya dalam struktur vertikal masyarakat, secara realitas dapat menyebabkan terjadinya pelapisan sosial, akan tetapi dalam kerangka sistem aspek ini cenderung menekankan perlunya simbol terhadap elit tertentu agar memiliki peran yang besar dalam rangka mengendalikan suatu sistem sosial. Sebutan elit sosial budaya biasanya cenderung bersifat non formal akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam kelompok masyarakatnya.

Struktur vertikal yang didasarkan pada dikotomi tradisional modern adalah menunjukkan kecenderungan adanya ketergantungan struktur masyarakat tradisional terhadap struktur masyarakat moderen berdasarkan berbagai indikator ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Masyarakat tradisional sering diidentikan dengan masyarakat pedesaan, sedangkan masyarakat moderen sering diidentikan dengan masyarakat perkotaan. Secara menyeluruh untuk kajian sistem sosial diperlukan adanya pengendalian terhadap berbagai fenomena yang ditimbulkan dari berbagai ciri vertikal struktur masyarakat ini menuju stabilitas sistem sosial. Dikotomi masyarakat tradisional-moderen, cenderung menganggap adanya ketergantungan masyarakat tradisional terhadap masyarakat moderen.

Masalah disintegrasi dalam struktur masyarakat majemuk berkaitan dengan beberapa faktor penyebab:

1. Adanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas; dalam berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik terdapat adanya kecenderungan kelompok minoritas menjadi lapisan elit yang berkuasa terhadap kelompok mayoritas. Masalah mayoritas dan minoritas ini sekaligus terkait dengan masalah konflik horizontal termasuk persoalan rasial. Ras pribumi berada pada kelompok mayoritas, sedangkan ras pendatang secara alamiah berada pada kelompok minoritas sekaligus menguasai berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik.
2. *Streotype Ethnic* adalah kecenderungan di setiap struktur masyarakat majemuk bahwa etnis tertentu atau bahkan setiap etnis merasa memiliki kelebihan dibanding etnis yang lain termasuk dalam hal pengendalian sistem sosial. Karena adanya anggapan yang demikian suatu etnis cenderung berkelompok dengan sesama etnisnya menjadi jalinan sub sistem tertentu. Dalam jaringan subsistem ini dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri tertentu pula

- yang tidak selalu bermakna positif tetapi sekaligus dapat bermakna negatif. Antar kelompok etnis sangat memungkinkan terjadi konflik yang mengarah terjadinya disintegrasi sistem.
3. Kesamaan persepsi tentang ideologi nasional, kasus-kasus di masyarakat majemuk, biasanya selalu diawali dengan adanya ideologi yang disepakati bersama. Tetapi dalam proses dinamika masyarakat, ideologi sebagai pedoman pemersatu menjadi bersifat multi-interpretatif dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan stabilitas sistem. Di tambah lagi dengan adanya kecenderungan kelompok memanfaatkan ideologi tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena itu masalah ideologi ini seringkali dimaknai dengan perlunya reposisi ideologis, agar dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat.
  4. Masalah agama, struktur masyarakat horizontal, di antaranya dicirikan dengan adanya beberapa agama yang ekstensinya diakui dalam setiap sistem sosial. Akan tetapi dalam setiap sistem sosial, cenderung terdapat jumlah pemeluk agama tertentu yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama yang lain. Setiap agama juga membawa prinsip-prinsip ajaran kebaikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antar pemeluk agama karena adanya usaha yang selalu dikembangkan untuk memperluas agama masing-masing. Hal inilah yang potensial memunculkan disintegrasi terutama apabila dikaitkan dengan persoalan suku dan rasialis.
  5. Kredibilitas struktur pemerintahan; struktur pemerintahan adalah mengendalikan sistem sosial secara menyeluruh. Struktur ini biasanya memiliki legitimasi untuk mengendalikan sistem untuk mencapai tujuan akan tetapi dalam proses pengendalian sistem, seringkali memunculkan persoalan, karena kurangnya kredibilitas dari sistem otoriter itu. Terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang menyimpang dari prinsip responsibilitas, akuntabilitas, netralitas, anonimitas dan transparansi. Hal inilah yang menyebabkan sistem menjadi potensial disintegrasi karena adanya upaya sub-sistem menuntut kredibilitas struktur pemerintahan.

Konflik yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial yang mudah terjadi pada masyarakat majemuk di Indonesia lebih pada dimensi horizontal sehingga lebih dikenal dengan istilah konflik horizontal. Walaupun dalam komunikasi formal pemerintah-masyarakat istilah ini sangat *tabu* untuk dipublikasikan, kemungkinan demi alasan integrasi nasional, namun faktanya konflik horizontal ini benar-benar terjadi yang secara kuantitas dan kualitas dari tahun ke tahun dari rezim ke rezim terus mengalami peningkatan.

Berikut ini gambaran konflik yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia:

1. Konflik lahan di dua Mesuji, baik di Kabupaten Mesuji Lampung, maupun di Kabupaten Mesuji Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, dan di Sape Nusa Tenggara Barat pada

penghujung tahun 2011, konflik terjadi antara aparat dengan warga. Kekerasan tersebut diwarnai jatuhnya banyak korban.

2. Kekerasan sosial di Sampang Madura. Kekerasan sosial dilakukan oleh sesama warga. Kekerasan tersebut diwarnai jatuhnya banyak korban.
3. Kekerasan sosial di Bima, Nusa Tenggara Barat.
4. Konflik mahasiswa dengan pihak pemerintah, masyarakat “kaum petani dan buruh” dengan pihak penguasa yang seringkali berujung pada bentrokan secara fisik dan mengakibatkan berjatuhnya korban yang tidak sedikit.
5. Kontras mencatat sepanjang tahun 2011, setidaknya terdapat 10 kasus kekerasan massal serius terjadi. Intensitasnya terjadi pada bulan April-Juli 2011 dan September-Desember 2011. Eskalasi kekerasan masih berlanjut hingga Januari 2012. Kekerasan massal ini umumnya terkait dengan sengketa pengelolaan sumber daya alam, suksesi politik lokal, sampai friksi sosial kehidupan keseharian warga. Pola kekerasan melibatkan kelompok warga, aparat kepolisian, dan kelompok korporasi bisnis di lokasi kejadian. Selain Lampung, Bima, dan Papua, titik-titik kekerasan massal juga terjadi di Bali dan Ambon.
6. Kekerasan sosial terjadi juga di Cikeusik Banten dan Temanggung Jawa Tengah yang berlatar belakang konflik agama.

Setiap orang Indonesia tentu tidak ingin terlibat dan menjadi korban kekerasan sosial, karena konstitusi kita telah menjamin hak setiap orang atas perlindungan dari negara/pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan data konflik yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial pada masyarakat majemuk Indonesia, dan harapan setiap orang Indonesia mendapatkan perlindungan dari negara/pemerintah sebagaimana telah digambarkan dalam uraian di atas, muncul pertanyaan:

1. Bagaimanakah konflik yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial pada struktur majemuk masyarakat Indonesia?

2. Apakah akar masalah dan solusi yang berkaitan dengan konflik sosial yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial pada struktur majemuk masyarakat Indonesia?

## II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang ada yang berkaitan dengan konflik dan kekerasan sosial pada struktur majemuk masyarakat Indonesia, terutama data sekunder penulis survei. Kegiatan survei ini dilakukan setelah masalah penelitian dipilih. Penelaahan kepustakaan termasuk memperoleh ide tentang masalah apa yang paling *up to date* untuk dirumuskan dalam penelitian.

Dengan survei ini, peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam analisis data yang telah dipergunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu; memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih; serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan. Studi literatur juga penulis gunakan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah ada, peneliti juga dapat belajar secara lebih sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya ilmiah, cara mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian.

Dalam mencari keterangan tentang buku serta bahan bacaan untuk keperluan studi ini penulis menggunakan sumber utama, yaitu buku referensi yaitu cara mencari petunjuk pada beberapa buku referensi yang memberi informasi langsung: kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, kamus biografi, buku atlas, dan buku statistik, dan yang memberi petunjuk pada sumber informasi: bibliografi, indeks, dan abstrak.

Setelah bahan bacaan berhasil penulis telusuri, dilanjutkan dengan membaca dan mencatat bahan-bahan perpustakaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Seterusnya dilakukan kegiatan mengutip informasi dengan bentuk pengutipan *Precis* (baca: praisi) yaitu pemendekan isi yang lebih padat dari ikhtisar atau *summary*, dengan memilih secara hati-hati material yang akan dipendekkan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang tidak lari dari rencana orisinal artikel.

Sumber bacaan yang dapat digunakan dalam penelitian ini banyak sekali. Setelah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan penelitian, sumber bacaan yang penulis

gunakan adalah: buku teks, surat kabar *online* seperti: [us.detiknews.com](http://us.detiknews.com), penyedia informasi *online* perorangan seperti: <http://sumbo.wordpress.com>, dan penyedia informasi *online* milik publik, privat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain, seperti: <http://staff.undip.ac.id>, <http://id.wikipedia.org>, <http://www.kontras.org>, dan lain-lain.

### **III. Tinjauan Pustaka.**

#### **A. Konflik dan Kekerasan.**

##### **1. Konflik.**

Secara etimologis, konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, pengertian konflik dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

- a. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan.
- b. Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.
- c. Menurut Robbin (1996), keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
- d. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi (Muchlas, 1999). Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres.

- e. Menurut Minnery (1985), Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
- f. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif (Robbins, 1993).
- g. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249).
- h. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi (Folger & Poole: 1984).
- i. Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341).
- j. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda (Devito, 1995:381)

Terdapat beberapa penyebab konflik, yaitu:

- a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.  
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.  
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan.

Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat.

Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap

semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

## 2. Kekerasan.

Kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai sebuah perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence*), bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti *kekuasaan* atau *berkuasa*) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan *kewenangannya* yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Akar Kekerasan: Kekayaan tanpa bekerja, Kesenangan tanpa hati nurani, Pengetahuan tanpa karakter, Perdagangan tanpa moralitas, Ilmu tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan, Politik tanpa prinsip. (*The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles.*— Mahatma Gandhi (1869-1948)).

Keragaman jenis dan definisi kekerasan dibagi menjadi lima jenis dengan masing-masing pengertian sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang dilakukan perorangan yakni perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan) oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya.
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai "monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah" yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain, genosida, dan lain-lain.).
- c. Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis/skizofrenia, dan lain-lain).
- d. Kekerasan dalam politik umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak

atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.

- e. Kekerasan simbolik (Bourdieu, *Theory of symbolic power*), merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural (Johan Galtung, *Cultural Violence*) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.

Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan - hingga batas tertentu - kepada binatang dan harta-benda. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk —kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinasi, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak —seperti yang terjadi dalam perang (yakni *kekerasan antar-masyarakat*) dan terorisme.

Sejak Revolusi Industri, kedahsyatan peperangan modern semakin meningkat hingga mencapai tingkat yang membahayakan secara universal. Dari segi praktis, peperangan dalam skala besar dianggap sebagai ancaman langsung terhadap harta benda dan manusia, budaya, masyarakat, dan makhluk hidup lainnya di muka bumi.

Secara khusus dalam hubungannya dengan peperangan terjadi pergeseran peran. Jurnalisme, misalnya, karena kemampuannya yang kian meningkat, telah berperan dalam membuat kekerasan yang dulunya dianggap merupakan urusan militer menjadi masalah moral dan menjadi urusan masyarakat pada umumnya.

Perubahan lainnya karena teknologi modern, terjadi transkulturasi. Teknologi modern, telah berperan dalam mengurangi *relativisme moral* yang biasanya berkaitan dengan nasionalisme, dan dalam konteks yang umum ini, gerakan "antikekerasan" internasional telah semakin dikenal dan diakui peranannya.

Dalam terminologi kekerasan dikenal juga istilah Geneologi Kekerasan sebagaimana dijelaskan oleh Henk Schulte Norholt yang mengurai geneologi akar kekerasan di masa penjajahan dalam dua gelombang besar kekerasan Belanda yang diinstitutionalisasi ke Indonesia. Kekerasan di Indonesia menurut Norholt terbentuk dari dua etape, yakni : pertama terjadi pada akhir abad 17, ketika VOC memonopoli perdagangan dengan menaklukkan kawasan-kawasan strategis, seperti Malaka, Makassar, dan Banten. VOC sebagai persekutuan

dagang melakukan *power construction* (membangun kekuasaan) dagang melalui jalan kekerasan.

Kedua, gelombang kekerasan periode selanjutnya terjadi antara dekade kedua akhir abad 19 hingga memasuki dekade pertama abad 20. Ketika itu Indonesia mengalami ekspansi imperialis dari peraturan kolonial. Menariknya, pada periode tersebut, tercatat 32 kali perang kolonial di kepulauan Indonesia. Inilah bagian yang disebut oleh Norholt sebagai rezim yang mewariskan ketakutan, kekerasan negara.

Pasca kemerdekaan, kekerasan masih terus mewarnai sejarah Indonesia. Pada periode ini, motif politik sebagai kontraksi ideologi terfiksi ke dalam tiga etape. Pertama, perebutan pengaruh komunisme dan sosialisme *vis a vis* dengan kekuatan kapitalistik. Ir. Soekarno yang mengidentifikasi diri sebagai representasi sosialisme dengan *term* lokal, marhaenisme. Walau secara tidak penuh, sebagai upaya untuk mengakomodir segala kepentingan politik yang ada pada masa itu, upaya Soekarno tersebut dapat kita saksikan dengan faham Nasakom (nasionalis, agama, komunis).

Periode kedua ditandai dengan kudeta sunyi –Supersemar 1966- Jenderal Soeharto yang lebih merepresentasikan diri sebagai kendali Barat. Perjalanan panjang kekuasaan Soeharto yang dikenal dengan represifitasnya, semakin memperbesar noda sejarah kekerasan. Institusionalisasi kekerasan yang mendapat legitimasi Negara ini, menemukan surganya.

Radikalisme rezim ini yang kemudian melahirkan gelombang reformasi. Namun naasnya, reformasi justru menjadi lahan subur reproduksi kekerasan gaya baru, kekerasan periode ketiga, yang juga memperluas domain kekerasan dari kekerasan oleh penguasaan pada kekerasan oleh rakyat (*violence by the authorities to violence by the citizen*).

## **B. Struktur Masyarakat Indonesia.**

### **1. Penggolongan Masyarakat Indonesia.**

Untuk mengetahui struktur masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua kurun waktu, yakni masa penjajahan Belanda, dan masa Kemerdekaan. Pada masa penjajahan ditemukan penggolongan masyarakat Indonesia berdasarkan bangsa, yaitu :

- a. Belanda dan Eropa lainnya
- b. Timur Asing
- c. Bumiputra

Setelah kemerdekaan penggolongan masyarakat Indonesia seperti tersebut di atas tidak ada lagi, karena yang ada hanyalah : Warga Negara Indonesia (WNI), dan Warga Negara Asing (WNA). Artinya golongan Belanda dan Eropa lainnya, dan Timur Asing terlempar dari sistem sosial budaya Indonesia.

Untuk memahami struktur masyarakat Indonesia yang menunjukkan perbedaan cukup tajam di antara kesatuan sosial dapat dilakukan dengan memahami dua dimensi berikut:

a. Dimensi Horisontal:

- 1) Suku bangsa
- 2) Agama
- 3) Adat
- 4) Kedaerahan

b. Dimensi Vertikal:

- 1) Lapisan bawah
- 2) Lapisan atas

## **2. Struktur Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan Hindia-Belanda dan Masa Kemerdekaan.**

Sebelumnya mari kita tengok pengertian masyarakat majemuk di bawah ini:

- a. Furnivall (1967:446-469) mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.
- b. Cyril S. Belshaw (N.J. 163:97) mengatakan suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang di anut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.
- c. Clifford Geertz (1963-105) mengatakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.
- d. Menurut karekteristiknya, van den Berghe mengatakan beberapa ciri utama masyarakat majemuk yang ditandai oleh:
  - 1) Terjadinya segmentasi.
  - 2) Lembaga non komplementer.
  - 3) Konsensus bukan atas dasar nilai yang bersifat dasar.
  - 4) Sering mengalami konflik.
  - 5) Intergrasi sosial tumbuh atas dasar paksaan (*coercion*).
  - 6) Dominasi kelompok satu terhadap yang lain.

## **3. Kemajemukan Masyarakat Indonesia masa penjajahan Hindia-Belanda.**

Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia pada masa itu dapat dilihat berdasarkan:

- a. Tipe; masyarakat Indonesia adalah tipe daerah tropis, dimana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras.
- b. Kehidupan politik; pertanda paling jelas adalah tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama (*common will*). Secara keseluruhan kehidupan itu tumbuh di atas dasar sistem kasta tanpa ikatan agama.
- c. Kehidupan ekonomi; ciri yang menonjol adalah tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama (*common social demand*)

Akibatnya, karakter ekonomi berbeda :

- a. Ekonomi majemuk (*plural economy*) pada masyarakat majemuk
- b. Ekonomi tunggal (*unitary economy*) pada masyarakat yang bersifat *homogeneous*.
- c. Kesamaan pola produksi dan ras (orang Belanda pada perkebunan, Pribumi pada pertanian, orang Thionghoa pada pemasaran).

#### 4. Pluralitas Masyarakat Indonesia masa Kemerdekaan.

- a. Keadaan geografis, memiliki kurang lebih 3000 pulau yang membentang dari timur ke barat sejauh 3000 mil dan dari utara ke selatan sejauh 1000 mil mengakibatkan pluralitas suku bangsa.
  - 1) Geertz menyebut lebih dari 300 suku bangsa;
  - 2) Skinner menyebut ada lebih dari 35 suku bangsa.
- b. Keadaan geografis; terletak di antara dua samudra mengakibatkan pluralitas agama.
  - 1) Hindu dan Budha, dari India 400 tahun SM;
  - 2) Islam masuk Abad XIII, menyebar Abad XV;
  - 3) Katolik masuk permulaan Abad XVI;
  - 4) Protestan masuk kira-kira Tahun 1600-an
- c. Keadaan ekologis; iklim dan tanah berbeda, akibatnya pluralitas regional.
  - 1) Daerah pertanian sawah (*wet rice cultivation*);
  - 2) Daerah pertanian ladang (*shifting cultivation*).(akibat lanjutan, kontras Jawa dan Liar Jawa dalam bidang kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya).

Berdasarkan dimensi vertikal masyarakat masa penjajahan Hindia-Belanda, dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan.
- b. Kontras pelapisan sosial yang semakin mengeras.

Akar ketimpangan tersebut menurut Boeke tumbuh subur pada masa penjajahan yang kemudian ia disebut sebagai *dualeconomy*. Pada masyarakat Indonesia masa penjajahan terdapat dua struktur ekonomi yang khas yakni :

- a. Struktur ekonomi modern, canggih.
- b. Struktur ekonomi pedesaan, sifat tradisional, orientasi sikap konservatif, motif memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada.

Oleh Edward Shils "gap" semacam itu disederhanakan sebagai struktur ekonomi kota dan struktur ekonomi desa, dengan ciri yang kontroversial :

- a. Orang kota bergairah, penuh aspirasi, relatif kaya, berpendidikan dan berpengaruh.
- b. Sementara orang desa kurang bergairah, melarat, kurang berpendidikan, serta tidak berdaya.

#### IV. **Akar Masalah Kekerasan Sosial dan Solusinya pada Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia.**

Fenomena konflik sosial yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan sosial pada struktur majemuk masyarakat Indonesia memiliki banyak akar masalah, antara lain:

1. Terkait erat dengan kegagalan pemerintah menyelenggarakan pembangunan sosial dan pembangunan daerah.
2. Suramnya masa depan, minimnya lapangan kerja, persaingan hidup yang semakin ketat, menipisnya kesantunan, dan lemahnya bangunan karakter menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia tak tahan banting menghadapi situasi yang ada. Terlebih, bangsa ini setiap hari diserbu budaya-budaya hedonistik sehingga mereka mengalami tekanan mental di dalam memburu segala keinginan. Akibatnya, sedikit saja emosi mereka terpancing, tidak jarang berubah menjadi kekerasan sosial.
3. Kelemahan negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan peran pemerintah dan aparat cenderung "impoten" menghadapi dominasi kelompok-kelompok sosial tertentu. Seolah-olah kelompok-kelompok sosial itu hadir melebihi otoritas pihak-pihak berwenang yang senyatanya menggawangi keamanan dan ketertiban. Itu sebabnya, sering kali ditemui kasus-kasus kekerasan sosial di negeri ini terkesan dibiarkan.
4. Fritjof Chapra di dalam bukunya *The Turning Point*, menyebut kekerasan sebagai "penyakit peradaban". Fritjof Chapra membaca patologi sosial ini (kekerasan), sebagai bias dari anomali ekonomi dan krisis budaya.
5. Masih menurut Fritjof Chapra, dari perspektif ekonomi, kekerasan lahir dari keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sumber daya ekonomi yang terbatas sementara kebutuhan tak terbatas memaksa manusia untuk bertindak nekad demi memenuhi kebutuhan.

6. Fritjof Chapra juga menjelaskan dari perspektif budaya bahwa struktur sosial yang bergolak dan akhirnya melahirkan kekerasan, merupakan indikasi adanya proses transformasi sehingga menyebabkan rasa keterasingan dan mental ketertinggalan. Menurut sejarawan Arnold Toynbee sebagaimana dikutip oleh Chapra, pergolakan budaya lahir dari pola interaksi sebagai cara sebuah peradaban melakukan dinamisasi untuk membentuk dirinya, mencari titik *equilibrium*. Irama dalam pertumbuhan budaya tersebut menimbulkan fluktuasi yang saling mempengaruhi antara dua kutub, para filsuf Cina menyebutnya Yin dan Yang, Empedocles menyebut sebagai pertarungan cinta dan benci.
7. Toynbee menyebut hilangnya fleksibilitas di dalam masyarakat multikultural merupakan tanda-tanda keruntuhan sebuah budaya. Struktur sosial dan pola perilaku masyarakat menjadi kaku, masyarakat tidak lagi mampu menyesuaikan diri dalam kreativitas respons. Kekakuan dan hilangnya fleksibilitas ini menyebabkan pudarnya harmoni secara umum dan mengarahkan masyarakat pada meletusnya perpecahan dan kekacauan sosial.
8. Globalisasi yang terjadi begitu derasnya, menyebabkan erosi dan *shock* budaya. Arus informasi yang menyerang dari berbagai lini kehidupan, merekonstruksi gaya baru dalam diri bangsa tercinta. Pada akhirnya, anak bangsa kehilangan jati diri akibat adanya polarisasi nilai-nilai luhur yang terkontaminasi oleh budaya asing. Padahal jika kita melihat sejarah masa lalu, kemajemukan bangsa Indonesia justru menjadi modal perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.
9. Di abad modern ini, dengan supremasi privat yang tak terbatas melalui dalih Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan sering kali berbenturan dengan realitas di dalam suatu masyarakat. HAM menjadi topeng untuk mengekspresikan diri, sementara masyarakat dengan anutan nilai-nilai yang luhur melihat perubahan sebagai ancaman.
10. Kekerasan sosial terjadi karena runtuhnya kepemimpinan informal di tengah masyarakat.
11. Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) lemah dalam mencegah terjadinya konflik.

Solusi atas beberapa akar masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan struktur sosialnya yang majemuk adalah sebagai berikut:

1. Membaca tafsir dan membumikan kembali dasar dan ideologi negara (Pancasila) menjadi solusi atas konflik sosial yang sering berakhir dengan kekerasan.
2. Sangat mendesak untuk terlebih dahulu menanamkan nilai-nilai Pancasila pada para pemimpin bangsa.
3. Pemerintah perlu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.
4. Pemerintah memfasilitasi terjadinya dialog yang intensif dengan korban kekerasan sosial.
5. Penegakan hukum harus konsisten, dan tidak pandang bulu, tidak tebang pilih.

6. Pemerintah (utamanya Presiden) jangan hanya mengatasi konflik sosial dari kaca mata politik saja. Artinya jangan setiap terjadi kekerasan sosial menjadi konsumsi politik untuk meningkatkan elektabilitas partai pengusungnya, tetapi benar-benar atas dasar fungsi pemerintah sebagai pelayan rakyat.
7. Untuk meredam potensi terjadinya konflik, pemerintah telah melakukan terobosan dengan meluncurkan situs pemantau konflik yang disebut Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK).

Pemerintah berpandangan bahwa sebaik-baiknya penyelesaian konflik adalah upaya pencegahan. Karena itu, perlu terkoordinasi dengan baik agar data yang ada dapat dipakai sebagai bahan bagi tindakan langkah-langkah preventif. Situs ini nantinya mampu memetakan konflik-konflik di Indonesia dan mendeteksi pemicu kekerasan lebih dini serta mengurangi dampak kekerasan sosial.

Sistem ini akan mengumpulkan data-data konflik atau kekerasan dari media lokal mulai dari 1998 hingga sekarang. Kumpulan data itu nantinya dipisahkan menjadi empat tema besar, yakni konflik sosial, kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam penegakan hukum. Untuk setiap kejadian yang masuk ke dalam salah satu kategori itu, variabel yang dicatat adalah tanggal, lokasi kejadian, jumlah korban tewas, luka, bangunan rusak, dan jumlah korban pemerkosaan. Juga pemicu dan bentuk konflik, senjata yang digunakan, serta upaya penghentian yang dilakukan.

Analisis penelitian dari data yang dikumpulkan akan terbit setiap empat bulan. Hasil analisis data itu akan digunakan untuk upaya pencegahan dan mengatasi konflik sehingga tidak sampai membesar apalagi sampai memakan korban.

Sebagai langkah awal, situs ini baru akan mencakup sembilan provinsi, yakni Jabodetabek, Aceh, Kalimantan Barat, NusanTenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya, pemerintah akan mengembangkan menjadi 13 wilayah lagi. Alasan baru sembilan provinsi, karena di wilayah-wilayah itu paling banyak terjadi konflik atau kekerasan. Sementara itu pembiayaan awal situs ini 100 persen melalui bantuan World Bank senilai USD 2 juta.

8. Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola, mengkritisi dan mengusulkan revisi Undang-undang Penanggulangan Kekerasan Sosial (UU PKS). Pemerintah dan DPR RI salah dalam mengartikan konflik. Peraturan itu melihat konflik melulu sebagai tindak kekerasan. Seharusnya UU PKS yang ditekankan bukan penanganan konflik tetapi pencegahan. Konflik itu lumrah terjadi dan yang terpenting adalah bagaimana mengelolanya. Jika itu dapat dilakukan, solusi konflik dapat disalurkan menjadi kekuatan positif untuk mentransformasi masyarakat.

Sejak UU PKS masih dibahas di DPR RI, telah diusulkan agar dibentuk sistem peringatan dini konflik sosial. Sistem itu terdiri dari 17 indikator dan dibagi menjadi tiga kategori yaitu hijau, kuning dan merah. Misalnya, indikator 1-6 masuk kategori hijau yaitu konflik yang ada masih dalam taraf wajar seperti tuntutan ekonomis. Indikator 7-12 masuk kategori kuning yaitu ada nada kebencian dari satu pihak tertentu kepada kelompok lain dengan cara bisik-bisik.

Terakhir adalah indikator 13-17 yang menunjukkan suatu kelompok sudah menyuarakan kebencian terhadap kelompok tertentu kepada publik. Dengan adanya indikator itu maka dapat diketahui potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Tiap daerah memiliki potensi konflik yang berbeda-beda, tergantung kondisi yang berkembang. Potensi konflik sebagian besar terdapat di kota tergolong menengah yaitu daerah dengan jumlah penduduk 100 ribu-1 juta jiwa.

Tercatat ada sekitar 320 daerah kategori menengah di Indonesia dan dua pertiga jumlah penduduknya berusia produktif. Atas dasar itu, persaingan yang ada di daerah menengah cukup sengit. Dari jumlah konflik yang dihimpun KontraS, konflik sosial itu berada di daerah yang tergolong menengah.

Sementara pihak yang kompeten untuk memantau indikator itu, yaitu Akademisi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sedangkan pemerintah, khususnya pemimpin daerah dan kepolisian sebagai pihak pengguna dari indikator tersebut, yang kemudian digunakan dalam memutuskan suatu kebijakan untuk mencegah meletusnya konflik sosial. Tak ketinggalan, dalam upaya mencegah konflik sosial, tokoh lokal turut dilibatkan.

Namun, pihak yang berhak menentukan siapa tokoh lokal yang berhak dilibatkan jangan diserahkan kepada pemimpin pemerintah atau kepolisian daerah. LIPI dan akademisi yang layak untuk menentukannya. Peralnya, butuh kajian untuk menentukan siapa tokoh lokal yang wajib diikutsertakan. Penentuan tokoh lokal itu bukan tanpa alasan, karena harus dilihat berapa besar pengaruh si tokoh lokal itu di tengah masyarakat.

Jika LIPI dan akademisi sudah menentukan siapa tokoh lokal yang cocok untuk diikutsertakan, maka langkah selanjutnya adalah meminta validasi dari masyarakat. Apakah benar para tokoh itu pengaruhnya besar di masyarakat. Sayangnya, usulan itu ditolak DPR RI. Sejauh ini, terdapat sejumlah negara yang menggunakan sistem pencegahan dini konflik sosial seperti berbagai negara di Eropa Timur dan Afrika. Tingkat keberhasilannya pun dalam mencegah konflik yang ada sangat relatif, tergantung dari kondisi yang ada di negara bersangkutan.

Sampai saat ini, berbagai kementerian masih sibuk membahas program kerja untuk mengimplementasikan UU PKS ini sesuai kewenangan kementerian yang bersangkutan.

Karena hal itu menyangkut pula dengan alokasi anggaran untuk menangani konflik sosial di tiap kementerian itu.

Oleh karenanya, maraknya konflik sosial yang terjadi belakangan ini belum dapat ditangani oleh pemerintah secara baik. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kementerian itu akan memetakan daerah yang rawan konflik sosial. Hampir semua kementerian mengambil pos (peran dalam UU PKS).

Di tengah upaya pemerintah yang lamban dalam menangani konflik sosial, organisasi masyarakat sipil (LSM) sangat penting. Peran LSM cukup baik membantu menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Namun, jika konflik itu sudah berubah menjadi bentrokan fisik dengan senjata tajam, maka aparat kepolisian wajib turun tangan.

9. Dalam perspektif masyarakat Jawa, solusi untuk mengatasi fenomena kekerasan yang dari waktu ke waktu semakin mengeras sudah *inheren* dalam ketetapan adat. Manakala seseorang yang sedang ditimpa masalah, maka penyelesaian masalahnya didekati dengan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Leluhur orang Jawa mengajarkan pada kita: "*yen ana rembug dirembug, nanging olehe ngrembug kanthi sareh.*" Orang modern memaknai *piwulang becik* semacam itu dengan pengertian: jika kita sedang memiliki masalah yang menyebabkan salah pengertian antar parapihak, maka marilah diselesaikan dengan kepala dingin dan hati tenang.

Nenek moyang kita juga meneladankan *lelaku*: "*aja tumindak grusa grusu, nanging tumindak kanthi landesan pikiran kang wening.*" Teladan tersebut, jika diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan: jika kita sedang memiliki masalah, jangan terburu-buru bereaksi untuk memutuskan masalah tersebut secara emosional dengan tindak kekerasan. Intisari dari teladan tersebut justru mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan segala sesuatunya dengan tenang. Selanjutnya dipertimbangkan untuk diputuskan secara bijaksana dan bermartabat.

Pesan moral yang ingin disampaikan nenek moyang kita dalam upaya menghentikan tindak kekerasan yang sudah menjadi fenomena dan semakin membahana ini, yakni: menjunjung tinggi akal budi demi kemaslahat umat manusia. Implementasinya adalah sangat tergantung pada upaya kita untuk senantiasa menyeimbangkan akal pikiran dan nalar perasaan. Keseimbangan dua kutub kekuatan fisik dan kekuatan spiritual umat manusia sangat dibutuhkan. Hasil dari buah keseimbangan nalar perasaan dan akal pikiran akan menjadi rekomendasi untuk membuat sebetuk keputusan yang disepakati bersama demi kebersamaan dan kedamaian umat manusia.

10. Terdapat juga berbagai macam strategi dasar yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, yaitu: *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam).
- a. *Contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Misalnya, Presiden Reagan menerapkan perilaku *contentious* (suka bertengkar) ketika secara sepihak memecat para anggota serikat buruh yang mengikuti aksi mogok. Contoh lain, di dalam pertengkaran antara kedua bocah, *contending* berbentuk tindakan fisik, yaitu bergulat untuk memperebutkan sepeda.
  - b. *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Misalnya, bagian Penjualan dan Produksi mengatasi perselisihan mereka atas penjadwalan produksi. Masing-masing pihak bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya mereka inginkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Penundaan selama tiga bulan mungkin telah cukup menguras keuntungan yang diharapkan oleh bagian Penjualan, dan maju tiga bulan dari jadwal produksi mungkin telah menimbulkan gangguan efisiensi yang serius pada bagian Produksi. *Yielding* memang menciptakan solusi, tetapi bukan berarti solusi yang berkualitas tinggi.
  - c. *Problem Solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Misalnya, dengan bantuan Presiden Carter dan para pembantunya, Mesir dan Israel akhirnya mampu melewati proses menuju tercapainya sebuah kesepakatan mengenai Semenanjung Sinai.
  - d. *Withdrawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya, perginya anak yang lebih kecil dari tempat kejadian, yang menyebabkan berakhirnya pertengkaran, merupakan suatu cara pendekatan terhadap konflik yang sangat berbeda dengan *problem solving*, *yielding*, maupun *contending*. *Withdrawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, sedangkan di dalam ketiga strategi yang lain tergantung upaya mengatasi konflik yang berbeda satu sama lain.
  - e. *Inaction* (diam) yaitu tidak melakukan apapun. Contoh, walaupun perundingan Camp David berakhir dengan *problem solving*, tetapi *inaction* sangat mendominasi prosesnya. Masing-masing pihak menunggu langkah berikut dari pihak lainnya, entah sampai kapan. Tetapi pada akhirnya usaha mengatasi jalan buntu itu justru berhasil karena keduanya (Mesir dan Israel) tidak melakukan apapun, yaitu ketika pada akhirnya Presiden Carter menetapkan tenggat waktu untuk meninggalkan perundingan. Langkah inilah yang mendorong kedua belah pihak untuk mengambil tindakan.

11. Solusi yang ditawarkan tidak selamanya bersifat penanganan, tapi juga yang bersifat pencegahan. Untuk mencegah terjadinya konflik, khususnya yang bersifat destruktif, Soetrisno (2003:18) mengungkapkan empat cara yang dapat dilakukan:
- a. Dalam berinteraksi dengan lingkungan kita dapat menggunakan asas “tepo seliro”. Artinya, apabila tidak mau disakiti orang lain jangan pula menyakiti orang lain.
  - b. Bersikap demokratis. Kita harus mampu menghargai pluralisme pendapat, paham, dan suku yang beragam dalam masyarakat.
  - c. Mengembangkan sikap toleransi terhadap agama yang berbeda tanpa kita harus keluar dari akidah agama kita masing-masing.
  - d. Orang Indonesia harus memiliki budaya baru yakni mau mengakui kekalahan dalam berargumentasi atau dalam hal bersaing guna memenangkan pemilu. Apabila memang argumentasi lawan lebih baik atau kalau partai politik lain memang memperoleh kepercayaan masyarakat, maka partai politik yang kalah harus mengakui bahwa memang mereka kalah.

Dengan pengertian lain, dalam kita berupaya mencegah terjadinya konflik yang destruktif, bangsa ini harus benar-benar menjunjung tinggi demokrasi, transparansi, dan toleransi. Tiga tonggak inilah yang bisa menciptakan sebuah masyarakat yang aman dan damai.

## V. Penutup.

Reformasi penyelenggaraan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berlangsung sejak 1988 menempatkan pemerintah pada posisi kurang baik di mata rakyatnya. Keberhasilan reformasi dalam beragam aturan penyelenggaraan kekuasaan negara sudah sangat memadai, namun implikasinya pada peningkatan taraf hidup rakyat masih jauh dari cita-cita reformasi yang digelorkan oleh kaum reformis pada awal-awal perjuangannya. *Gap* antara harapan yang sangat besar pada reformasi ini dan kenyataan untuk segera hidup bahagia yang tidak kunjung dirasakan, mengakibatkan frustrasi yang salah satunya diekspresikan dalam bentuk kekerasan sosial.

Kontras mencatat sepanjang 2011 kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia berdasarkan intensitas dan eskalasi adalah: terdapat kurang lebih 10 kasus yang terjadi pada bulan April-Juli 2011 dan September-Desember 2011. Kekerasan ini umumnya terkait dengan sengketa pengelolaan sumber daya alam, suksesi politik lokal, sampai friksi sosial kehidupan keseharian warga. Pola kekerasan melibatkan kelompok warga, aparat kepolisian, dan kelompok korporasi bisnis di lokasi kejadian. Selain Lampung, Bima, dan Papua, titik-titik kekerasan juga terjadi di Bali dan Ambon. Agar tidak mengancam integrasi nasional pemerintah

perlu segera merumuskan alternatif solusi penanganan masalah kekerasan sosial ini yang lebih substansial daripada formalistik-seremonial.

Berdasarkan sebelas solusi yang ditawarkan, baik secara eksplisit maupun implisit menempatkan negara/pemerintah sebagai pihak yang paling menentukan keberhasilan penanganan dan atau pencegahan kekerasan sosial. Konstitusi kita telah menjamin hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari negara/pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

#### Buku Teks:

Nasikun. 2005. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin: Terjemahan Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. 2004: *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahman, Bustami dan Hary Yuswadi. 2004. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jember: Kompyawisda.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005: *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetrisno, Loekman. 2003. *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press.

Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Konteks Trasisi: Kasus Indonesia 1990-2001*. Jakarta: United Nations Support for Indonesian Recovery.

#### Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### Website:

[http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam\\_berita&id=6013](http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=6013), diakses 3 Januari 2012.

<http://bangka.tribunnews.com/2012/01/28/memahami-anarkisme-sosial>, diakses 3 Januari 2012.

[http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1442](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1442), diakses 3 Januari 2012.

<http://www.harianbhirawa.co.id/opini/42590-menyelami-akar-kekerasan-sosial>, diakses 3 Januari 2012.

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469924/>, diakses 3 Januari 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses 3 Januari 2012.

<http://us.detiknews.com/read/2011/04/26/164702/1626090/471/geneologi-kekerasan-terorisme-dan-solusinya>, diakses 3 Januari 2012.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b3689694903/uu-pks-dinilai-lemah-cegah-konflik-sosial>, diakses 3 Januari 2012.

<http://www.bisnis.com/articles/konflik-lampung-kontras-minta-disediakan-mekanisme-pemulihan-hak-korban>, diakses 3 Januari 2012.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses 3 Januari 2012.

<http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/04/kekerasan-sosial/>, diakses 3 Januari 2012

<http://sumbo.wordpress.com/2011/02/12/analisis-kr-fenomena-kekerasan/>, diakses 3 Januari 2012.